



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2023



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH



JL. SULTAN ALAIDIN MAHMUDSYAH NO. 14 BANDA ACEH – 23242
TELP. (0651) 22146, FAX (0651) 33615



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia-Nya, penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2023 dapat diselesaikan. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun Anggaran 2023.

Pelaksanaan Program kerja pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh sudah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Dengan tersusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan Tahun 2023, serta sebagai acuan untuk tahap pembangunan tahun selanjutnya. Terima kasih

Banda Aceh, Januari 2022
**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
Dan Persandian Aceh**

Marwan Nusuf, B.Hsc. MA
NIP. 19710521 200212 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan	5

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2022

2.1	Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Aceh tahun lalu dan Renstra Perangkat Aceh Tahun 2017-2022 (Tabel Terlampir)	6
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Aceh (Tabel Terlampir)	7
2.3	Isu-isu Penting Pelayanan Perangkat Aceh	9
2.4	Review terhadap Rancangan Akhir RKPA	12

BAB III TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL, TUJUAN DAN SASARAN

3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	13
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja SKPA	14
3.3	Program dan Kegiatan	15

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT ACEH (Tabel Terlampir)

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi yang disebabkan oleh beberapa hal. Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain; keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur, Kondisi demikian tentu menjadi tugas negara dalam hal ini pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi, pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat dan keamanan informasi.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh sebagai Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang membidangi komunikasi informatika dan persandian tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan Dinas Kominfosandi maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Provinsi Aceh.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua SKPA.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) adalah dokumen perencanaan Dinas untuk periode satu tahun, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Fungsi RENJA Dinas adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA Dinas memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis Dinas.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian diawali dengan orientasi untuk membentuk kesamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai dokumen yang mendasari penyusunan Rencana Kerja SKPD, seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh 2023. Selanjutnya, setiap Seksi menyusun rancangan Rencana Kerja untuk tahun anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing beserta anggaran yang diperlukan. Hasil rancangan Rencana Kerja dari tiap-tiap Seksi kemudian disusun menjadi Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Dalam Rencana Kerja Dinas Kominfo dan Sandi Aceh Tahun 2023 ini ada beberapa peraturan dan Undang-Undang yang mendasari Rencana Kerja Diskominfo dan Persandian Aceh Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2015.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial Oleh Pemerintah Daerah
19. Qanun Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.

20. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Hasil Minyak dan Gas dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.
21. Qanun No 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh;
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2012 – 2017;
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;
24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan TIK;
25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari rencana kerja ini adalah sebagai panduan dalam melakukan penyusunan program/kegiatan Renja Tahun 2023 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja dan anggaran Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh Tahun 2023.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2023 ini adalah sebagai salah satu dasar untuk penyusunan renja selanjutnya di tahun 2023. Penyusunan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) yang nantinya di tuang ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Pemerintah Aceh terdiri dari :

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Aceh tahun lalu dan Renstra Perangkat Aceh Tahun 2017-2022 (*Tabel Terlampir*)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Aceh (*Tabel Terlampir*)
- 2.3 Isu-isu Penting Pelayanan Perangkat Aceh
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Aceh
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT ACEH (tabel terlampir)

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN LALU DAN RENSTRA PERANGKAT ACEH TAHUN 2023-2026

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2022 dan Renstra Perangkat Aceh Tahun 2023-2026

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2022

Proses penyusunan suatu perencanaan pembangunan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dimana hasil evaluasi tersebut dapat teridentifikasi hal-hal sebagai berikut : sejauh mana proses perencanaan pembangunan telah dilaksanakan oleh SKPA dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil Evaluasi ini sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022 berjumlah Rp. 52.730.000.000,- dengan sumber dana berasal dari DAU, PAA DAN SILPA PAA dengan rincian masing-masing alokasi anggaran sebagai berikut adalah :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
(1)	(2)	(3)
1	ACEH	52.730.000.000,-
	GAJI/TUNJANGAN	14.270.974.032,-
	- PAA	7.123.939.076,-
	- DAU	7.185.582.032,-
	-	
	RUTIN	38.420.478.892,-
	OPERASIONAL/PEMBANGUNAN	
	- SILPA PAA	38.420.478.892,-
	TOTAL	52.730.000.000,-

Tabel T-C. 29
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPA TAHUN 2022
PROVINSI ACEH

Nama SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cetak Dokumen Perencanaan Honorarium ASN dan Non ASN Makan dan Minum Lembur ASN Uang Lembur ASN	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	100%	50 Dokumen	50 Dokumen	90%
01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Peralatan kelistrikan perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk mendukung kinerja aparaturnya dalam pelayanan publik Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan di Lingkungan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman Surat Dinas dan Pengadaan materai	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Honorarium Non ASN Terwujudnya lingkungan perkantoran yang bersih dan nyaman	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
01.1.09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas, Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								
02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi								
02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Kegiatan Publikasi Pemerintah Aceh	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya Kegiatan PPID Utama	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
02.1.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Kegiatan Peliputan Pemerintah Aceh	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terlaksananya Kegiatan Diseminasi Informasi Pemerintah	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	5 Kegiatan	5 Kegiatan	90%
02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terlaksananya Kegiatan Komisi Informasi Aceh dan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								
03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi								
03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terjaminnya Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi								
03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Egovernment yang memiliki manfaat bagi Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Honorarium Petugas Ruang Server Pemerintah Aceh Pembaharuan Lisensi Perangkat Keamanan Pengadaan Perangkat Pendukung Data Center Pemerintah Aceh	12 Bulan 7 Lisensi 6 Kegiatan	12 Bulan 7 Lisensi 6 Kegiatan	12 Bulan 7 Lisensi 6 Kegiatan	100%	12 Bulan 7 Lisensi 6 Kegiatan	12 Bulan 7 Lisensi 6 Kegiatan	90%
03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Sistem Jaringan Internet Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Egovernment yang memiliki manfaat bagi Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota serta Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
03.1.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Tersedianya Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								
02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi								
02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan	35 Data	35 Data	35 Data	90%	35 Data	35 Data	80%
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								
02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi								
02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Terwujudnya Kebijakan Tata Kelola Persandian	46 SKPA	46 SKPA	46 SKPA	90%	46 SKPA	46 SKPA	80%

B. Renstra Perangkat Aceh Tahun 2023-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Bidang PP BAPPEDA	
							Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	2	3	4	5	6	8	10	12	14	19	
1	2	10	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	P2KSDM	
1	2	10	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	100	100	P2KSDM	
1	2	10	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	-	-	100	100	P2KSDM	
1	2	10	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	100	100	100	P2KSDM	
1	2	10	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laogran Wajib)	%	100	-	-	100	100	P2KSDM	
1	2	10	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik Serta Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan e-Government dan terintegrasi	%	85	85	85	85	85	P2KSDM	
1	2	10	17	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	Orang	14	150	180	190	200	220	P2KSDM
1	2	10	18	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Jumlah Berita yang di Publikasikan di Media Massa dan Jumlah Mas Media yang memuat berita	%	85	85	85	85	85	P2KSDM	
1	2	10	19	Program Pengembangan Data dan Statistik	Kemudahan dan keterbukaan Akses Data dan Informasi pada masyarakat (Jumlah Pengakses Offline dan online) dan Jumlah Informasi Publik yang diakses	%	85	85	85	85	85	P2KSDM	
1	2	10	20	Program pengembangan data dan informasi secara terpadu	Persentase integrasi sistem informasi sektoral	%	85	-		75	80	90	P2KSDM

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPA

Sesuai dengan perkembangan pembangunan yang mengarahkan kepada kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan Pemerintah Aceh, maka Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh dalam melakukan koordinasi penyusunan program/kegiatan yang dapat mempercepat tercapainya tujuan tersebut.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh-* memiliki beberapa fungsi dalam penyelenggaraan tugas pokok yaitu :

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Penyusunan program dan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian;
4. Pembinaan teknis di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian lintas Kabupaten/Kota;
5. Pembinaan SDM Aparatur di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian;
6. Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian;
7. Perencanaan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian mencakup wilayah Provinsi;
8. Perencanaan Tata Ruang Komunikasi, Informatika dan Persandian;
9. Pengembangan Fasilitas dan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
10. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;

Kewenangan Diskominsa untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas adalah :

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar datacenter, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi eGovernment, integras layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi eGovernment, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat lingkup provinsi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar datacenter, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi eGovernment, integras layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi eGovernment, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat lingkup provinsi;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar datacenter, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi eGovernment, integras layanan publik dan

kepemerintahan, layanan keamanan informasi eGovernment, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat lingkup provinsi;

TABEL T-C. 30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK			Target Renstra SKPA		Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
			2019 (n-2)	2020 (n-1)	2021 (n)	2022 (n+1)	2020 (n-1)	2021 (n)	2022 (n+1)	2023 (n+1)	
1	Jumlah Berita yang di Publikasikan di Media Massa	Jumlah	500	700	800	900	700	800	900	900	Target Tercapai
2	Jumlah Mas Media yang memuat berita	Jumlah	9	10	10	10	10	10	10	10	Target Tercapai
3	Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	Orang	180	190	200	220	190	200	220	250	Target Tercapai
4	Kemudahan dan keterbukaan Akses Data dan Informasi pada masyarakat (Jumlah Pengakses Offline dan online)	Jumlah	600	700	800	900	700	800	900	900	Target Tercapai
5	Jumlah Informasi Publik yang diakses	Jumlah	250	300	350	400	300	350	400	400	Target Tercapai

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominsa Aceh

Sesuai dengan Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi serta permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh (Diskominsa), maka dirumuskan permasalahan visi dan misi serta permasalahan tersebut ke dalam bentuk yang terarah dan operasional berupa pembuatan tujuan dan sasaran dinas.

Adapun tujuan Diskominsa mengacu pada Qanun Nomor 13 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan komunikasi, informatika persandian dan statistik
2. Penyelenggaraan urusan umum dan Pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik

4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
5. Pelaksanaan pengasawan, pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.

Berbagai kondisi yang ada di bidang urusan Komunikasi, Informatika dan Persandian yang perlu mendapat perhatian khusus. Permasalahan tersebut dapat diuraikan berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

A. Bidang Teknologi Komunikasi & Informatika dan Informasi Publik

Perkembangan Teknologi Informasi pada era ini menjadikan salah satu faktor utama dalam hal berkembangnya tingkat kebutuhan yang tinggi di sektor komunikasi, informatika dan persandian. Kebutuhan komunikasi dengan baik dan memperoleh informasi yang akurat terkini merupakan kebutuhan alamiah masyarakat yang terus berkembang dan mengalami peningkatan dalam pemenuhannya. Beberapa permasalahan yang ditemui di sektor ini antara lain :

1. Sebagai payung hukum dalam sektor komunikasi dan informatika, Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik masih belum maksimal, masyarakat belum sepenuhnya menyadari hak dan kewajibannya dalam hal berkomunikasi dan memperoleh informasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dibutuhkan peran aktif serta dukungan dari Pemerintah untuk mensosialisasikan dan menerapkannya secara aktif.
2. Salah satu bentuk komunikasi yang sedang dikembangkan saat ini adalah sistem komunikasi satu arah menuju ke multi arah (jaringan), agar komunikasi dan informasi yang berkembang dan diterima dapat diarahkan secara tepat dan terarah, dibutuhkan forum dan wadah yang mendukung berlangsungnya system komunikasi jaringan yang tepat.

Pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat akan kegiatan pemerintahan dan perlunya peran aktif masyarakat dalam pengawasan kegiatan belum dapat terpenuhi dengan baik. Tersedianya wadah yang dikelola dengan baik dan dapat berperan secara aktif dan efektif, diharapkan dapat mendukung pemerintahan yang bersih, adil dan transparan serta mengakomodir kebutuhan masyarakat seutuhnya.

B. Bidang Komunikasi Publik

1. Dibutuhkan forum dan wadah yang mendukung berlangsungnya sistem komunikasi dari satu arah menuju ke berbagai arah (jaringan);
2. Masih terbatasnya penerapan teknologi komunikasi dan informasi, dalam mendukung operasional di sektor komunikasi, informatika dan persandian;
3. Perkembangan masyarakat yang kritis menuntut tersedianya media dan fasilitas sebagai bentuk peran aktif masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan sehingga diharapkan dapat mendukung pemerintahan yang bersih, adil dan transparan serta mengakomodir kebutuhan masyarakat seutuhnya .
4. Kesenjangan antara mereka yang dapat mengakses dunia digital dan teknologi informasi dengan mereka yang masih terbatas aksesnya atau tidak memiliki akses sama sekali akibat disparitas ketersediaan infrastruktur antara perkotaan dan perdesaan.
5. Pelayanan bidang komunikasi, informatika dan persandian terhadap kelompok masyarakat tertentu seperti penyandang cacat, gender dan anak-anak serta lanjut usia belum mendapatkan perhatian yang memadai.
6. Pengembangan manajemen informasi yang berbasis *open data* di lingkungan Pemerintah Aceh.
7. Sosialisasi manajemen informasi yang berbasis *open data* di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
8. Kegiatan Produksi Konten Digital Pemerintah Aceh seperti iklan layanan digital, produksi film dan video digital, perpustakaan digital, serta pelayanan pelayanan digital lainnya yang dipandang menyangkut kegiatan pemerintahan.
9. Peningkatan SDM terkait pengelolaan data dan integrasi aplikasi, serta peningkatan SDM di bidang keamanan informasi E-Government.
10. Pelaksanaan FGD terkait mapping aplikasi dan pembentukan kesepahaman kelola data terintegrasi antar Dinas/Badan/Lembaga
11. Integrasi Kelompok Aplikasi Dasar dan Layanan
12. Pembuatan Aplikasi Tatap Muka Data yang Terintegrasi
13. Pengembangan Kebijakan Keamanan Informasi E-Government
14. Pembentukan Tim Penanganan Insiden Keamanan Informasi
15. Kesadaran Keamanan Informasi dan Internet Sehat di lingkungan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota

C. Bidang Persandian

Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Sektor persandian pada dinas komunikasi, informatika dan persandian perlu mendapat pengembangan serius ke depan terkait pengamanan informasi pemerintah. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Beberapa isu permasalahan terkait persandian adalah :

1. Perlu adanya peningkatan sistem keamanan informasi dalam rangka keotentikan informasi maupun informasi klarifikasi
2. Terbatasnya sumber daya di bidang persandian saat ini, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya perangkat/peralatan persandian. Perlunya pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan bagi SDM Aparatur di sektor persandian. Selanjutnya, perangkat persandian yang ada saat ini belum maksimal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintahan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPA

Hasil review Rancangan Awal RKPA terdapat tantangan dan kemajuan yang telah dicapai hingga tahun 2016. Peningkatan hasil-hasil pembangunan yang memberikan manfaat kepada masyarakat perlu secara terus menerus diupayakan melalui perencanaan, implementasi serta pengawasan pembangunan sesuai dengan maksud dan tujuan otonomi daerah, dengan menciptakan program program di daerah yang bersifat jangka panjang sehingga peningkatan kualitas terhadap masyarakat diharapkan lebih terpadu dan terarah.

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) disusun berdasarkan perumusan strategi pembangunan didasarkan antara lain pada analisis gambaran umum dan kondisi daerah serta analisis ekonomi dan keuangan daerah. Selanjutnya, evaluasi dilaksanakan terhadap hasil analisis tersebut yang dilanjutkan kepada proses perumusan strategi. Proses perumusan strategi diperlukan mengingat fak-tor strategis lingkungan akan menentukan keberhasilan pelaksanaan visi dan misi yang ditetapkan.

Strategi yang diterapkan dalam sektor Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2017 – 2022 adalah :

1. Prioritas penuntasan program kegiatan yang terbengkalai;
2. Optimalisasi sarana dan prasarana yang telah ada;
3. Integrasi Sektor Komunikasi, Informatika dan Persandian;
4. Peningkatan Pelayanan mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM);
5. Peningkatan Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
6. Pengembangan Aplikasi E-Government;
7. Pengembangan dan Perluasan Akses Jaringan dan Komunikasi Data;
8. Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik, yang mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008;
9. Optimalisasi Kualitas SDM Aparatur di bidang Persandian
10. Manajemen Informasi yang berbasis *open data*
11. Pengembang Konten Digital Pemerintah
12. Sinergitas Program Yang dibiayai melalui APBN, APBD dan APBK.

Selanjutnya berdasarkan strategi yang ditetapkan, Pemerintah Aceh melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh akan menyusun program dan kegiatan yang secara bertahap dilaksanakan berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

TABEL T-C. 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2023
PROVINSI ACEH

Nama SKPA : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

KODE	Rancangan awal RKPA						KODE	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator/Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	ACEH	Cetak Dokumen Perencanaan Honorarium ASN dan Non ASN Makan dan Minum Lembur ASN Uang Lembur ASN	50 Dokumen	486.834.000	DAU	01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	ACEH	Cetak Dokumen Perencanaan Honorarium ASN dan Non ASN Makan dan Minum Lembur ASN Uang Lembur ASN	50 Dokumen	486.834.000	DAU	
01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ACEH	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	12 Bulan	14.270.974.032	DAU/ PAA	01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ACEH	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	12 Bulan	14.270.974.032	DAU/ PAA	
01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ACEH	Tersedianya Peralatan kelistrikan perkantoran	12 Bulan	50.103.124	DAU	01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ACEH	Tersedianya Peralatan kelistrikan perkantoran	12 Bulan	50.103.124	DAU	
01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ACEH	Tersedianya alat tulis kantor untuk mendukung kinerja aparatur dalam pelayanan publik Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan	12 Bulan	1.106.821.380	DAU	01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ACEH	Tersedianya alat tulis kantor untuk mendukung kinerja aparatur dalam pelayanan publik Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan	12 Bulan	1.106.821.380	DAU	
01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	ACEH	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	148.000.000	DAU	01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	ACEH	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	148.000.000	DAU	
01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	ACEH	Tersedianya Bahan Bacaan di Lingkungan Perkantoran	12 Bulan	31.091.942	DAU	01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	ACEH	Tersedianya Bahan Bacaan di Lingkungan Perkantoran	12 Bulan	31.091.942	DAU	
01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ACEH	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	640.000.000	DAU	01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ACEH	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	640.000.000	DAU	
01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
01.1.07.05	Pengadaan Mebel	ACEH	Tersedianya Mebel Dinas	12 Bulan	150.000.000	DAU	01.1.07.05	Pengadaan Mebel	ACEH	Tersedianya Mebel Dinas	12 Bulan	150.000.000	DAU	
01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ACEH	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	433.508.273	DAU	01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ACEH	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	433.508.273	DAU	
01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ACEH	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	80.000.000	DAU	01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ACEH	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	80.000.000	DAU	
01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ACEH	Pengiriman Surat Dinas dan Pengadaan material	12 Bulan	20.200.000	DAU	01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ACEH	Pengiriman Surat Dinas dan Pengadaan material	12 Bulan	20.200.000	DAU	
01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ACEH	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	12 Bulan	1.070.320.200	DAU	01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ACEH	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	12 Bulan	1.070.320.200	DAU	
01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ACEH	Penyediaan Honorarium Non ASN Terwujudnya lingkungan perkantoran yang bersih dan nyaman	12 Bulan	2.896.040.000	DAU	01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ACEH	Penyediaan Honorarium Non ASN Terwujudnya lingkungan perkantoran yang bersih dan nyaman	12 Bulan	2.896.040.000	DAU	
01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ACEH	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas, Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	12 Bulan	878.256.364	DAU	01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ACEH	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas, Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	12 Bulan	878.256.364	DAU	
01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	ACEH	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	12 Bulan	40.000.000	DAU	01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	ACEH	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	12 Bulan	40.000.000	DAU	
01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ACEH	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	199.500.000	DAU	01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ACEH	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	199.500.000	DAU	
01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	ACEH	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	695.500.000	DAU	01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	ACEH	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	695.500.000	DAU	

KODE	Rancangan awal RKPA						KODE	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator/Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						
02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi						02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi						
02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	ACEH	Terlaksananya Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Bulan	479.031.000	SILPA PAA	02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	ACEH	Terlaksananya Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Bulan	479.031.000	SILPA PAA	
02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	ACEH	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Bulan	284.603.000	SILPA PAA	02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	ACEH	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		284.603.000	SILPA PAA	
02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	ACEH	Terlaksananya Kegiatan Publikasi Pemerintah Aceh	12 Bulan	596.551.004	SILPA PAA	02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	ACEH	Terlaksananya Kegiatan Publikasi Pemerintah Aceh	12 Bulan	596.551.004	SILPA PAA	
02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	ACEH	Terlaksananya Kegiatan PPID Utama	12 Bulan	1.930.000.000	SILPA PAA	02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	ACEH	Terlaksananya Kegiatan PPID Utama	12 Bulan	1.930.000.000	SILPA PAA	
02.1.01.07	Layanan Hubungan Media	ACEH	Terlaksananya Kegiatan Layanan Hubungan Media	12 Bulan	1.450.200.000	SILPA PAA	02.1.01.07	Layanan Hubungan Media	ACEH	Terlaksananya Kegiatan Layanan Hubungan Media		1.450.200.000	SILPA PAA	
02.1.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	ACEH	Terlaksananya Kegiatan Peliputan Pemerintah Aceh	12 Bulan	156.600.000	SILPA PAA	02.1.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	ACEH	Terlaksananya Kegiatan Peliputan Pemerintah Aceh	12 Bulan	156.600.000	SILPA PAA	
02.1.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	ACEH	Terlaksananya Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis	12 Bulan	555.000.000	SILPA PAA	02.1.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	ACEH	Terlaksananya Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis		555.000.000	SILPA PAA	
02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	ACEH	Terlaksananya Kegiatan Diseminasi Informasi Pemerintah Aceh	5 Kegiatan	409.209.000	SILPA PAA	02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	ACEH	Terlaksananya Kegiatan Diseminasi Informasi Pemerintah Aceh	5 Kegiatan	409.209.000	SILPA PAA	
02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	ACEH	Terlaksananya Kegiatan Komisi Informasi Aceh dan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh	12 Bulan	3.000.000.000	SILPA PAA	02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	ACEH	Terlaksananya Kegiatan Komisi Informasi Aceh dan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh	12 Bulan	3.000.000.000	SILPA PAA	
02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	ACEH	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	12 Bulan	514.032.200	SILPA PAA	02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	ACEH	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		514.032.200	SILPA PAA	
02.1.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung, Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	ACEH	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung, Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	12 Bulan	148.972.472	SILPA PAA	02.1.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung, Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	ACEH	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung, Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		148.972.472	SILPA PAA	
03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						
03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi						03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi						
03.1.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	ACEH	Tersedianya Lisensi SSL selama 2 tahun	4 Lisensi	193.817.700	SILPA PAA	03.1.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	ACEH	Tersedianya Lisensi SSL selama 2 tahun	4 Lisensi	193.817.700	SILPA PAA	
03.1.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	ACEH	Jumlah SDM ASN Terlatih dalam Pengelolaan Domain	46 orang	125.740.000	SILPA PAA	03.1.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	ACEH	Jumlah SDM ASN Terlatih dalam Pengelolaan Domain	46 orang	125.740.000	SILPA PAA	
03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	ACEH	Terjaminnya Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	12 Bulan	1.100.797.700	SILPA PAA	03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	ACEH	Terjaminnya Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	12 Bulan	1.100.797.700	SILPA PAA	

KODE	Rancangan awal RKPA						KODE	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator/Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi						03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi						
03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	ACEH	Meningkatnya Nilai Indeks SPBE Pemerintah Aceh Tersedianya Rekomendasi Pelaksanaan SPBE Provinsi Tersedianya Rekomendasi Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Keras SPBE	3.2 Indeks 1 rekomendasi 2 rekomendasi	356.200.000	SILPA PAA	03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	ACEH	Meningkatnya Nilai Indeks SPBE Pemerintah Aceh Tersedianya Rekomendasi Pelaksanaan SPBE Provinsi Tersedianya Rekomendasi Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Keras SPBE	3.2 Indeks 1 rekomendasi 2 rekomendasi	356.200.000	SILPA PAA	
03.1.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	ACEH	Jumlah SKPA yang mengikuti Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	47 SKPA	50.000.000	SILPA PAA	03.1.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	ACEH	Jumlah SKPA yang mengikuti Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	47 SKPA	50.000.000	SILPA PAA	
03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	ACEH	Honorarium Petugas Ruang Server Pemerintah Aceh Pembaharuan Lisensi Perangkat Keamanan Pengadaan Perangkat Pendukung Data Center Pemerintah Aceh	12 Bulan 7 Lisensi 6 Kegiatan	8.505.834.160	SILPA PAA	03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	ACEH	Honorarium Petugas Ruang Server Pemerintah Aceh Pembaharuan Lisensi Perangkat Keamanan Pengadaan Perangkat Pendukung Data Center Pemerintah Aceh	12 Bulan 7 Lisensi 6 Kegiatan	8.505.834.160	SILPA PAA	
03.1.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	ACEH	Tersedianya Sistem Jaringan Internet Pemerintah Daerah	12 Bulan	43.650.400	SILPA PAA	03.1.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	ACEH	Tersedianya Sistem Jaringan Internet Pemerintah Daerah	12 Bulan	43.650.400	SILPA PAA	
03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	ACEH	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Egovernment yang memiliki manfaat bagi Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota serta Masyarakat	12 Bulan	1.768.857.649	SILPA PAA	03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	ACEH	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Egovernment yang memiliki manfaat bagi Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota serta Masyarakat	12 Bulan	1.768.857.649	SILPA PAA	
03.1.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	ACEH	Terlaksananya Workshop Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan dan Bimtek Integrasi Data	4 Kegiatan	24.252.000	SILPA PAA	03.1.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	ACEH	Terlaksananya Workshop Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan dan Bimtek Integrasi Data	4 Kegiatan	24.252.000	SILPA PAA	
03.1.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	ACEH	Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	12 Bulan	874.150.000	SILPA PAA	03.1.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	ACEH	Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	12 Bulan	874.150.000	SILPA PAA	
03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	ACEH	Tersedianya Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	12 Bulan	125.000.000	SILPA PAA	03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	ACEH	Tersedianya Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	12 Bulan	125.000.000	SILPA PAA	
03.1.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	ACEH	Rekomendasi Pengembangan Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT) Terlaksananya Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi	1 rekomendasi 2 Peraturan	347.800.000	SILPA PAA	03.1.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	ACEH	Rekomendasi Pengembangan Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT) Terlaksananya Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi	1 rekomendasi 2 Peraturan	347.800.000	SILPA PAA	
03.1.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	ACEH	Terlaksananya move dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE Pemerintah Provinsi Tersedianya perangkat pendukung penyelenggaraan Ekosistem SPBE Pemerintah Provinsi	23 Kab/Kota 12 unit	274.633.244	SILPA PAA	03.1.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	ACEH	Terlaksananya move dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE Pemerintah Provinsi Tersedianya perangkat pendukung penyelenggaraan Ekosistem SPBE Pemerintah Provinsi	23 Kab/Kota 12 unit	274.633.244	SILPA PAA	

KODE	Rancangan awal RKPA						KODE	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator/Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						
02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi						02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi						
02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	ACEH	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan	35 Data	156.650.000	SILPA PAA	02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	ACEH	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan	35 Data	156.650.000	SILPA PAA	
02.1.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	ACEH	Tersedianya SDM yang kompetitif, berkualitas dan profesional	2 Kegiatan	111.011.000	SILPA PAA	02.1.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	ACEH	Tersedianya SDM yang kompetitif, berkualitas dan profesional	2 Kegiatan	111.011.000	SILPA PAA	
02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	ACEH	Tersedianya Metadata Satastatistik Sektoral dan Geospasial	17 Metadata	136.420.156	SILPA PAA	02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	ACEH	Tersedianya Metadata Satastatistik Sektoral dan Geospasial	17 Metadata	136.420.156	SILPA PAA	
02.1.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	ACEH	Terciptanya Program Kelembagaan yang efektif guna menunjang Peningkatan Bidang	6 Orang	284.184.000	SILPA PAA	02.1.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	ACEH	Terciptanya Program Kelembagaan yang efektif guna menunjang Peningkatan Bidang Geospasial	6 Orang	284.184.000	SILPA PAA	
02.1.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	ACEH	Tercapainya Informasi yang Efektif tentang Otorisasi Statistik dan geospasial	2 Kegiatan	279.654.000	SILPA PAA	02.1.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	ACEH	Tercapainya Informasi yang Efektif tentang Otorisasi Statistik dan geospasial	2 Kegiatan	279.654.000	SILPA PAA	
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						
02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi						02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi						
02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	ACEH	Terwujudnya Kebijakan Tata Kelola Persandian	46 SKPA	423.900.000	SILPA PAA	02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	ACEH	Terwujudnya Kebijakan Tata Kelola Persandian	46 SKPA	423.900.000	SILPA PAA	
02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	ACEH	Terselenggaranya Kegiatan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Aceh	47 SKPA	115.400.000	SILPA PAA	02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	ACEH	Terselenggaranya Kegiatan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Aceh	47 SKPA	115.400.000	SILPA PAA	
02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi						02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi						
02.1.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	ACEH	Terselenggaranya Jaring Komunikasi Sandi Dalam Rangka Pengamanan informasi	47 SKPA dan Kab./Kota	110.700.000	SILPA PAA	02.1.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	ACEH	Terselenggaranya Jaring Komunikasi Sandi Dalam Rangka Pengamanan Informasi	47 SKPA dan Kab./Kota	110.700.000	SILPA PAA	

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL, TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya mengembangkan sarana komunikasi baik melalui media baru seperti internet maupun media tradisional yang sempat berkembang pada masa sebelumnya. Pengembangan sarana komunikasi tersebut diharapkan dapat mendukung penyebaran informasi dan upaya pemerintah untuk menjalin hubungan dengan masyarakat. Keberadaan berbagai media komunikasi tentunya memberikan tantangan tersendiri bagi Lembaga Hubungan Masyarakat di Pemerintah Daerah untuk dapat menentukan media-media apa saja yang dirasa efektif untuk menjalin komunikasi dan menyerap aspirasi dari masyarakat. Oleh karena itu, Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2023 lebih dititikberatkan untuk pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika, penyebarluasan informasi dengan menggunakan pilihan media yang efektif untuk menjangkau khalayak, mengelola kelompok-kelompok informasi pada masyarakat di tingkat kecamatan serta pengelolaan informasi data statistik guna penyediaan data untuk pembangunan. Pelaksanaan program diprioritaskan pula untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditentukan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika. Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memenuhi SPM, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian juga diarahkan untuk sejalan dengan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika ACEH yaitu untuk menyebarkan informasi pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan.

Kebijakan di sektor Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh diuraikan sebagai berikut :

1. Prioritas penuntasan program kegiatan yang terbengkalai;
2. Optimalisasi sarana dan prasarana yang telah ada;
3. Integrasi Sektor Komunikasi, Informatika dan Persandian;
4. Peningkatan Pelayanan mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM);
5. Peningkatan Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
6. Pengembangan Aplikasi E-Government;

7. Pengembangan dan Perluasan Akses Jaringan dan Komunikasi Data;
8. Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik, yang mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008;
9. Optimalisasi Kualitas SDM Aparatur dan Peralatan Yang Mendukung di bidang Persandian
10. Manajemen Informasi yang berbasis *open data*
11. Pengembangan Konten Digital Pemerintah
12. Sinergitas Program Yang dibiayai melalui APBN, APBD dan APBK.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2023 adalah sebagai bagian dari Qanun RPJMA Tahun 2023 – 2026. Adapun yang menjadi visi Kepala Daerah yang menjadi dasar dalam pengembangan perencanaan pembangunan daerah Aceh adalah *“Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani”*.

Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi pembangunan Aceh sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi’iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki;
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional;
5. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi;
6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan;
7. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan;
8. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, perdagangan, industri dan industri kreatif yang kompetitif;
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan;
10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

MISI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

Sektor Informasi Dan Komunikasi Publik

Membangun jaringan informasi dan mengintegrasikan data kelompok-kelompok informasi masyarakat sebagai penggerak forum dialogis dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.

Sektor Teknologi Informasi Komunikasi

Membangun dan mengembangkan TIK Pemerintah Aceh dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Aceh yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi guna memberikan layanan informasi publik secara transparan dan akuntabel.

Sektor Persandian

Membangun dan mengembangkan SDM Aparatur Pemerintah khususnya di bidang Persandian dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Aceh yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi guna memberikan layanan informasi publik yang sehat dan aman. Membangun fasilitas dan perangkat persandian untuk mendukung operasional pelaksanaan persandian di sector pemerintahan.

Review Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah (repetada) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, sehingga dalam penyelenggaraan tugas dan pokok dan fungsinya akan mewujudkan suatu system yang terpadu dan saling mendukung dengan sector lainnya.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh adalah :

1. Komunikasi dan Informasi

- Terbangunnya informasi pedesaan dan terbentuknya kelompok informasi dan komunikasi masyarakat.
- Terwujudnya masyarakat yang sadar informasi untuk meningkatkan kualitas hidup.
- Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan komunikasi yang prima dan terpadu. Komunikasi yang efektif dan efisien terhadap penyelenggaraan transportasi.
- Terwujudnya Sistem Penyiaran Aceh yang Berkeadilan, Bermartabat dan Bermanfaat.

2. Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Terlaksananya pembangunan dan pengembangan E-Government Pemerintah Aceh guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Aceh yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi kepada publik secara transparan dan akuntabel.
- Terlaksananya pembangunan infrastruktur dan mengembangkan Telematika Daerah dalam rangka meningkatkan jaringan komunikasi dan informasi untuk akses informasi baik secara Regional, Nasional maupun Global.
- Tersedianya fasilitas penyediaan portal website, pengisian data ke dalam data base oleh setiap SKPA secara online dan terciptanya pelayanan terhadap para pengguna jasa telematika secara berkualitas, efektif dan efisien.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

A. Program

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan upaya dalam mengantisipasi berbagai permasalahan di Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

B. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintahan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan program yang telah ditetapkan bersama, maka perlu ditetapkan beberapa kegiatan untuk menunjang program-program yang telah ada.

Untuk merealisasikan program di atas, ditetapkan Kegiatan dan Sub Kegiatan antara lain :

a. Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
8. Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
9. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
10. Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Provinsi
11. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
12. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi

b. Sub Kegiatan

1. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8. Pengadaan Mebel
9. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
15. Pemeliharaan Mebel
16. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
18. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
19. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
20. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
21. Pelayanan Informasi Publik
22. Layanan Hubungan Media
23. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
24. Manajemen Komunikasi Krisis
25. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
26. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
27. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
28. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung, Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
29. Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi
30. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
31. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
32. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
33. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
34. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
35. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
36. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
37. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
38. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
39. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
40. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
41. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
42. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
43. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
44. Membangun Metadata Statistik Sektoral
45. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
46. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

47. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
48. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
49. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT ACEH

RKA KUA PPAS TAHUN 2022

NO	KODE REKENING	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG	SUMBER DANA	PAGU KUA PPAS 2022
		BELANJA			52.730.000.000
I	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			23.197.149.315
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			486.834.000
	2.16.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sekretariat	DAU	486.834.000
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14.270.974.032
	2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat	DAU/PAA	14.270.974.032
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.976.016.446
	2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat	DAU	50.103.124
	2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekretariat	DAU	1.106.821.380
	2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sekretariat	DAU	148.000.000
	2.16.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat	DAU	31.091.942
	2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat	DAU	640.000.000
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			663.508.273
	2.16.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Sekretariat	DAU	150.000.000
	2.16.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat	DAU	433.508.273
	2.16.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat	DAU	80.000.000
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.986.560.200
	2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat	DAU	20.200.000
	2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat	DAU	1.070.320.200
	2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat	DAU	2.896.040.000
	2.16.01.1.09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.813.256.364
	2.16.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekretariat	DAU	878.256.364
	2.16.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Sekretariat	DAU	40.000.000
	2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat	DAU	199.500.000
	2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretariat	DAU	695.500.000
II	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			11.524.198.676
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi			11.524.198.676
	2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	PLIP	SILPA PAA	479.031.000
	2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	PKP	SILPA PAA	784.603.000
	2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	PKP	SILPA PAA	596.551.004
	2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	PLIP	SILPA PAA	2.430.000.000
	2.16.02.1.01.07	Layanan Hubungan Media	PKP	SILPA PAA	1.450.200.000
	2.16.02.1.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	PKP	SILPA PAA	156.800.000
	2.16.02.1.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	PLIP	SILPA PAA	555.000.000
	2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	PKP	SILPA PAA	1.409.209.000
	2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	PLIP	SILPA PAA	3.000.000.000
	2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	PKP	SILPA PAA	514.032.200
	2.16.02.1.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung, Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	PKP	SILPA PAA	148.972.472
III	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			16.390.732.853
	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			1.420.355.400
	2.16.03.1.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	E-Gov	SILPA PAA	193.817.700
	2.16.03.1.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	E-Gov	SILPA PAA	125.740.000
	2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	TIK	SILPA PAA	1.100.797.700
	2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			14.970.377.453
	2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	E-Gov	SILPA PAA	356.200.000
	2.16.03.1.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	E-Gov	SILPA PAA	50.000.000
	2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	TIK	SILPA PAA	8.505.834.160
	2.16.03.1.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	TIK	SILPA PAA	43.650.400
	2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	E-Gov	SILPA PAA	1.768.857.649
	2.16.03.1.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	TIK	SILPA PAA	24.252.000
	2.16.03.1.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	E-Gov	SILPA PAA	3.474.150.000
	2.16.03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	TIK	SILPA PAA	125.000.000
	2.16.03.1.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCO)	E-Gov	SILPA PAA	347.800.000
	2.16.03.1.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	E-Gov	SILPA PAA	274.633.244
IV	2.20	URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK			967.919.156
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			967.919.156
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi			967.919.156
	2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	UPTD STATISTIK	SILPA PAA	156.650.000
	2.20.02.1.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	UPTD STATISTIK	SILPA PAA	111.011.000
	2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	UPTD STATISTIK	SILPA PAA	136.420.156
	2.20.02.1.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	UPTD STATISTIK	SILPA PAA	284.184.000
	2.20.02.1.01.06	Penyelenggaraan Otisasi Statistik Sektoral di Daerah	UPTD STATISTIK	SILPA PAA	279.654.000
IV	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			650.000.000
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			650.000.000
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			539.300.000
	2.21.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	PERSANDIAN	SILPA PAA	423.900.000
	2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	PERSANDIAN	SILPA PAA	115.400.000
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi			110.700.000
	2.21.02.1.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	PERSANDIAN	SILPA PAA	110.700.000

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh merupakan tahap awal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Tahun 2023-2026, dimana tahun ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJM periode 2023-2026. Program dan kegiatan di tahun 2023 tetap mengacu kepada Kebijakan Nasional sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas Pembangunan Aceh yaitu pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi. Upaya pembenahan implementasi perencanaan dimulai dengan konsistensi penanganan urusan yang menjadi wewenang Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh namun tetap berupaya menuntaskan kegiatan terbengkalai. Pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan mekanisme penanganan pengawasan pembangunan secara berkala. Diharapkan dengan kegiatan ini akan tercapai peningkatan pelayanan dan peningkatan kinerja jaringan komunikasi, informatika dan persandian. Selanjutnya dalam bidang informasi dan komunikasi, pemerintah Aceh berupaya meningkatkan kinerja pelayanan sistem teknologi informasi dan komunikasi pemerintah dengan pengaplikasian program dan kegiatan berbasis e-government, dan upaya meningkatkan pelayanan penyebarluasan informasi berbasis media cetak dan penyiaran.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana strategis Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh Tahun 2023 - 2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran – sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana kerja Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh Tahun 2022 harus menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh diharapkan mampu mencapai tingkat capaian program dan kegiatan yang telah disusun. Upaya yang dilakukan antara lain dengan melaksanakan peningkatan kinerja Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh di Tahun berjalan 2022 dan perencanaan strategi sesuai program dan kegiatan di tahun 2023 serta menetapkan berbagai kebijakan serta solusi dalam menghadapi berbagai isu dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh saat ini.

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah (repetada) Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh, sehingga dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya akan mewujudkan suatu sistem yang terpadu dan saling mendukung dengan sektor lainnya. Berhasilnya pelaksanaan Renja Tahun 2022 ini secara konsekuen dan penuh tanggung jawab sangat tergantung kepada sumber daya manusia, partisipasi seluruh masyarakat dan berbagai sektor terkait lainnya, serta pada sikap mental dan semangat ketaatan dan disiplin bagi seluruh aparatur pemerintah baik di Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Rencana Kerja Diskominsa Aceh ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, sehingga hasilnya mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Aceh dalam rangka merencanakan pembangunan daerah yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran serta berkesinambungan.

Proses penyusunan dokumen Renja ini telah dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu partisipatif, bottom up, top down, teknokratik dan politik. Dengan pendekatan tersebut telah dilakukan sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan Pemerintah melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Koordinasi merupakan prinsip yang sangat penting dalam setiap tahapan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi hingga pelaporan hasil-hasilnya. Untuk mencapai upaya maksimal, koordinasi pembangunan dilakukan secara lintas sektoral dan lintas daerah di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat lokal dan masyarakat.

Dokumen ini merupakan referensi utama yang digunakan oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) Tahun 2023. Semoga hasil dari Rencana Kerja Tahun 2023 ini dapat menghasilkan suatu rumusan dan strategi dalam penyelenggaraan pembangunan yang lebih konkrit dan realitas.

Tabel T-C. 28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD

Nama SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	0,389	0,361	0,348	0,336	0,324	0,313	0,313
	Persentase informasi publik yang diumumkan	30	50	65	85	90	95	95
	Persentase informasi publik yang disediakan	50	55	65	80	92	97	97
	Persentase layanan informasi publik	45	53	64	71	83	96	96
	Persentase pengelolaan informasi dan dokumentasi Informasi publik	20	23	35	47	60	70	70
	Persentase PPID OPD yang aktif	15	30	43	56	60	70	65
	Tersedianya satu data pembangunan	Tidak Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

TABEL T-C.32.
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/MASYARAKAT TAHUN 2023
PROVINSI ACEH

Nama SKPA : Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KOMINFO TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN TAHUN 2024

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
 Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
		CAPAIAN PROGRAM	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)
								TOLAK UKUR	TARGET	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WA JIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				48.130.000.000					48.130.000.000
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				46.512.080.844					46.512.080.844
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100%	23.197.149.315	DAU		Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	100%	23.197.149.315
01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPA	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	9 Dokumen	486.834.000	DAU		Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPA	9 Dokumen	486.834.000
01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cetak Dokumen Perencanaan Honorarium ASN dan Non ASN Makan dan Minum Lembur ASN Uang Lembur ASN	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	50 Dokumen	486.834.000	DAU		Cetak Dokumen Perencanaan Honorarium ASN dan Non ASN Makan dan Minum Lembur ASN Uang Lembur ASN	50 Dokumen	486.834.000
01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100%	14.270.974.032	DAU/ PAA		Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	100%	14.270.974.032
01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12 Bulan	14.270.974.032	DAU/ PAA		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	12 Bulan	14.270.974.032
01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100%	1.976.016.446	DAU		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	100%	1.976.016.446
01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Peralatan kelistrikan perkantoran	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12 Bulan	50.103.124	DAU		Tersedianya Peralatan kelistrikan perkantoran	12 Bulan	50.103.124

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
		CAPAIAN PROGRAM	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)
								TOLAK UKUR	TARGET	
01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk mendukung kinerja aparatur dalam pelayanan publik Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12 Bulan	1.106.821.380	DAU		Tersedianya alat tulis kantor untuk mendukung kinerja aparatur dalam pelayanan publik Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan	12 Bulan	1.106.821.380
01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12 Bulan	148.000.000	DAU		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	148.000.000
01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan di Lingkungan Perkantoran	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12 Bulan	31.091.942	DAU		Tersedianya Bahan Bacaan di Lingkungan Perkantoran	12 Bulan	31.091.942
01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultas	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12 Bulan	640.000.000	DAU		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultas	12 Bulan	640.000.000
01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100%	663.508.273			Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	100%	663.508.273
01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel Dinas	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12 Bulan	150.000.000	DAU		Tersedianya Mebel Dinas	12 Bulan	150.000.000
01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12 Bulan	433.508.273	DAU		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	433.508.273
01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12 Bulan	80.000.000	DAU		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	80.000.000
01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100%	3.986.560.200	DAU		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	100%	3.986.560.200
01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman Surat Dinas dan Pengadaan materi	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12 Bulan	20.200.000	DAU		Pengiriman Surat Dinas dan Pengadaan materi	12 Bulan	20.200.000
01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12 Bulan	1.070.320.200	DAU		Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	12 Bulan	1.070.320.200

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
		CAPAIAN PROGRAM	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)
								TOLAK UKUR	TARGET	
01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Honorarium Non ASN Terwujudnya lingkungan perkantoran yang bersih dan nyaman	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12 Bulan	2.896.040.000	DAU		Penyediaan Honorarium Non ASN Terwujudnya lingkungan perkantoran yang bersih dan nyaman	12 Bulan	2.896.040.000
01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100%	1.813.256.364	DAU		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1.813.256.364
01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas, Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12 Bulan	878.256.364	DAU		Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas, Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	12 Bulan	878.256.364
01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12 Bulan	40.000.000	DAU		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	12 Bulan	40.000.000
01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12 Bulan	199.500.000	DAU		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	199.500.000
01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12 Bulan	695.500.000	DAU		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	695.500.000
02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik / Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan e-Government dan terintegrasi	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100%	9.524.198.676	SILPA PAA		Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik / Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan e-Government dan terintegrasi	100%	9.524.198.676
02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik / Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan e-Government dan terintegrasi	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100%	9.524.198.676	SILPA PAA		Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik / Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan e-Government dan terintegrasi	100%	9.524.198.676
02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12 Bulan	479.031.000	SILPA PAA		Terlaksananya Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Bulan	479.031.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
		CAPAIAN PROGRAM	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)
								TOLAK UKUR	TARGET	
02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12 Bulan	284.603.000	SILPA PAA		Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Bulan	284.603.000
02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Kegiatan Publikasi Pemerintah Aceh	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12 Bulan	596.551.004	SILPA PAA		Terlaksananya Kegiatan Publikasi Pemerintah Aceh	12 Bulan	596.551.004
02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya Kegiatan PPID Utama	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12 Bulan	1.930.000.000	SILPA PAA		Terlaksananya Kegiatan PPID Utama	12 Bulan	1.930.000.000
02.1.01.07	Layanan Hubungan Media	Terlaksananya Kegiatan Layanan Hubungan Media	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12 Bulan	1.450.200.000	SILPA PAA		Terlaksananya Kegiatan Layanan Hubungan Media	12 Bulan	1.450.200.000
02.1.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Kegiatan Peliputan Pemerintah Aceh	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12 Bulan	156.600.000	SILPA PAA		Terlaksananya Kegiatan Peliputan Pemerintah Aceh	12 Bulan	156.600.000
02.1.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	Terlaksananya Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12 Bulan	555.000.000	SILPA PAA		Terlaksananya Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis	12 Bulan	555.000.000
02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terlaksananya Kegiatan Diseminasi Informasi Pemerintah Aceh	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	5 Kegiatan	409.209.000	SILPA PAA		Terlaksananya Kegiatan Diseminasi Informasi Pemerintah Aceh	5 Kegiatan	409.209.000
02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terlaksananya Kegiatan Komisi Informasi Aceh dan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12 Bulan	3.000.000.000	SILPA PAA		Terlaksananya Kegiatan Komisi Informasi Aceh dan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh	12 Bulan	3.000.000.000
02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12 Bulan	514.032.200	SILPA PAA		Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	12 Bulan	514.032.200
02.1.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung, Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung, Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12 Bulan	148.972.472	SILPA PAA		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung, Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	12 Bulan	148.972.472
03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	220 Orang	13.790.732.853	SILPA PAA		Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	220 Orang	13.790.732.853

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
		CAPAIAN PROGRAM	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)
								TOLAK UKUR	TARGET	
03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	220 Orang	1.420.355.400	SILPA PAA		Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	220 Orang	1.420.355.400
03.1.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Tersedianya Lisensi SSL selama 2 tahun	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	4 Lisensi	193.817.700	SILPA PAA		Tersedianya Lisensi SSL selama 2 tahun	4 Lisensi	193.817.700
03.1.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah SDM ASN Terlatih dalam Pengelolaan Domain	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	46 orang	125.740.000	SILPA PAA		Jumlah SDM ASN Terlatih dalam Pengelolaan Domain	46 orang	125.740.000
03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terjaminnya Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12 Bulan	1.100.797.700	SILPA PAA		Terjaminnya Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	12 Bulan	1.100.797.700
03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	220 Orang	12.370.377.453	SILPA PAA		Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	220 Orang	12.370.377.453
03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Nilai Indeks SPBE Pemerintah Aceh Tersedianya Rekomendasi Pelaksanaan SPBE Provinsi Tersedianya Rekomendasi Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Keras SPBE	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	3.2 Indeks 1 rekomendasi 2 rekomendasi	356.200.000	SILPA PAA		Meningkatnya Nilai Indeks SPBE Pemerintah Aceh Tersedianya Rekomendasi Pelaksanaan SPBE Provinsi Tersedianya Rekomendasi Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Keras SPBE	3.2 Indeks 1 rekomendasi 2 rekomendasi	356.200.000
03.1.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah SKPA yang mengikuti Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	47 SKPA	50.000.000	SILPA PAA		Jumlah SKPA yang mengikuti Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	47 SKPA	50.000.000
03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Honorarium Petugas Ruang Server Pemerintah Aceh Pembaharuan Lisensi Perangkat Keamanan Pengadaan Perangkat Pendukung Data Center Pemerintah Aceh	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12 Bulan 7 Lisensi 6 Kegiatan	8.505.834.160	SILPA PAA		Honorarium Petugas Ruang Server Pemerintah Aceh Pembaharuan Lisensi Perangkat Keamanan Pengadaan Perangkat Pendukung Data Center Pemerintah Aceh	12 Bulan 7 Lisensi 6 Kegiatan	8.505.834.160
03.1.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Tersedianya Sistem Jaringan Internet Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12 Bulan	43.650.400	SILPA PAA		Tersedianya Sistem Jaringan Internet Pemerintah Daerah	12 Bulan	43.650.400

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
		CAPAIAN PROGRAM	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)
								TOLAK UKUR	TARGET	
03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Egovernment yang memiliki manfaat bagi Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota serta Masyarakat	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12 Bulan	1.768.857.649	SILPA PAA		Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Egovernment yang memiliki manfaat bagi Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota serta Masyarakat	12 Bulan	1.768.857.649
03.1.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terlaksananya Workshop Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan dan Bimtek Integrasi Data	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	4 Kegiatan	24.252.000	SILPA PAA		Terlaksananya Workshop Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan dan Bimtek Integrasi Data	4 Kegiatan	24.252.000
03.1.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12 Bulan	874.150.000	SILPA PAA		Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	12 Bulan	874.150.000
03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Tersedianya Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12 Bulan	125.000.000	SILPA PAA		Tersedianya Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	12 Bulan	125.000.000
03.1.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Rekomendasi Pengembangan Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT) Terlaksananya Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1 rekomendasi 2 Peraturan	347.800.000	SILPA PAA		Rekomendasi Pengembangan Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT) Terlaksananya Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi	1 rekomendasi 2 Peraturan	347.800.000
03.1.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Terlaksananya monev dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE Pemerintah Provinsi Tersedianya perangkat pendukung penyelenggaraan Ekosistem SPBE Pemerintah Provinsi	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	23 Kab/Kota 12 unit	274.633.244	SILPA PAA		Terlaksananya monev dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE Pemerintah Provinsi Tersedianya perangkat pendukung penyelenggaraan Ekosistem SPBE Pemerintah Provinsi	23 Kab/Kota 12 unit	274.633.244
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				967.919.156					967.919.156
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kemudahan dan keterbukaan Akses Data dan Informasi pada masyarakat (Jumlah Pengakses Offline dan online) / Jumlah Informasi Publik yang diakses	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	900 / 400 Jumlah / Jumlah	967.919.156	SILPA PAA		Kemudahan dan keterbukaan Akses Data dan Informasi pada masyarakat (Jumlah Pengakses Offline dan online) / Jumlah Informasi Publik yang diakses	900 / 400 Jumlah / Jumlah	967.919.156

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
		CAPAIAN PROGRAM	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)
								TOLAK UKUR	TARGET	
02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Kemudahan dan keterbukaan Akses Data dan Informasi pada masyarakat (Jumlah Pengakses Offline dan online) / Jumlah Informasi Publik yang diakses	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	900 / 400 Jumlah / Jumlah	967.919.156	SILPA PAA		Kemudahan dan keterbukaan Akses Data dan Informasi pada masyarakat (Jumlah Pengakses Offline dan online) / Jumlah Informasi Publik yang diakses	900 / 400 Jumlah / Jumlah	967.919.156
02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	35 Data	156.650.000	SILPA PAA		Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan	35 Data	156.650.000
02.1.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Tersedianya SDM yang kompetitif, berkualitas dan profesional	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	2 Kegiatan	111.011.000	SILPA PAA		Tersedianya SDM yang kompetitif, berkualitas dan profesional	2 Kegiatan	111.011.000
02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersedianya Metadata Satatistik Sektoral dan Geospasial	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	17 Metadata	136.420.156	SILPA PAA		Tersedianya Metadata Satatistik Sektoral dan Geospasial	17 Metadata	136.420.156
02.1.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Terciptanya Program Kelembagaan yang efektif guna menunjang Peningkatan Bidang Geospasial	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	6 Orang	284.184.000	SILPA PAA		Terciptanya Program Kelembagaan yang efektif guna menunjang Peningkatan Bidang Geospasial	6 Orang	284.184.000
02.1.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Tercapainya Informasi yang Efektif tentang Otorisasi Statistik dan geospasial	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	2 Kegiatan	279.654.000	SILPA PAA		Tercapainya Informasi yang Efektif tentang Otorisasi Statistik dan geospasial	2 Kegiatan	279.654.000
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				650.000.000					650.000.000
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase integrasi sistem informasi sektoral	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	90%	650.000.000	SILPA PAA		Persentase integrasi sistem informasi sektoral	90%	650.000.000
02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase integrasi sistem informasi sektoral	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	90%	539.300.000	SILPA PAA		Persentase integrasi sistem informasi sektoral	90%	539.300.000
02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Terwujudnya Kebijakan Tata Kelola Persandian	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	46 SKPA	423.900.000	SILPA PAA		Terwujudnya Kebijakan Tata Kelola Persandian	46 SKPA	423.900.000
02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terselenggaranya Kegiatan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Aceh	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	47 SKPA	115.400.000	SILPA PAA		Terselenggaranya Kegiatan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Aceh	47 SKPA	115.400.000

[illegible]